BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;
d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

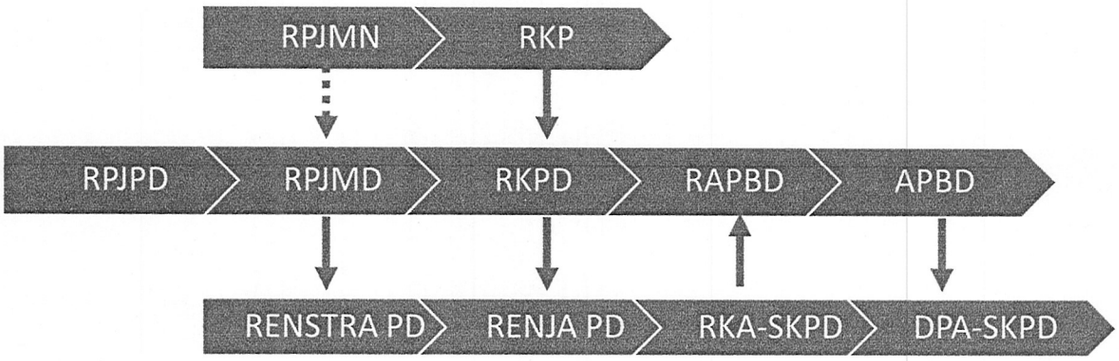
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah

yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (pertama) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2021)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan									
7.01				Bidang Urusan									
7.01	*01*			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***	***100%***		**2.641.885.990**	**2.086.616.245**	**78,98 %**	***100%***	100 %	
7.01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD**	**3 Dok**		**18.080.000**	**18.080.000**	**100 %**	**3 Dok**	**6 Dok**	**100 %**
7.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang dibuat	3 Dok		18.080.000	18.080.000	100 %	3 Dok	6 Dok	100 %
7.01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Tersedianya Laporan Keuangan**	**23 ASN**		**2.422.717.000**	**1.883.640.412**	**77,75**	**23 ASN dan**	**26**	**100 %**

				Perangkat Daerah	**SKPD**	**dan 13 dok**				**%**	**13 dok**	**dokumen**	
7.01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang dibayarkan	23 PNS		2.420.487.000	1.881.410.412	77,73 %	23 PNS	26 PNS	100 %
7.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen		1.060.000	1.060.000	100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %
7.01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen		1.170.000	1.170.000	100 %	12 dokumen	2 4 dokumen	100 %
7.01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**	**25 stel dan 24 kali**		**2.400.000**	**2.400.000**	**100 %**	**25 stel dan 24 kali**	**24 bulan**	**100 %**
7.01	01	2.05	**02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	25 stel		-	-	-	25 stel	50 stel	100 %
7.01	01	2.05	**09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah belanja honorarium instruktur senam	24 kali		2.400.000	2.400.000	100 %	24 kali	28 kali	100 %
7.01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**	**12 bulan**		**38.014.040**	**29.524.100**	**77,67 %**	**13 jenis , 75 meter, 15 orang, 25 kegiatan dan 25 file**	24 bulan	100 %
7.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis		1.500.000	1.376.000	91,73 %	4 jenis	8 jenis	100 %
7.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah ATK , mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	7 jenis		22.265.040	19.729.100	88,61 %	7 jenis	14 jenis	100 %
7.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	75 m2		1.436.500	1.212.000	84,37 %	75 m2	150 m2	100 %
7.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	2 jenis		3.000.000	2.820.000	94 %	2 jenis	4 jenis	100 %
7.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu ysng difasilitasi	15 orang		1.812.500	1.667.000	91,97	15 orang	30 orang	100 %

										%			
7.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 kegiatan		8.000.000	2.720.000	34 %	25 kegiatan	50 kegiatan	100 %
7.01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	25 file		-	-	-	25 file	50 file	100 %
7.01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 buah dan 6 Unit**		**16.229.200**	**16.170.900**	**99,64 %**	**6 buah dan 6 Unit**	**24 bulan**	**100 %**
7.01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler yang diadakan	4 buah		6.379.800	6.330.900	99,23 %	6 buah	10 buah	100 %
7.01	**01**	**2.07**	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan.	6 Unit		9.849.400	9.840.000	99,90 %	6 Unit	12 unit	100 %
7.01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**2 orang dan 6 rekening**		**68.900.000**	**62.220.633**	**90,31 %**	**2 orang dan 6 rekening**	**24 bulan**	**100 %**
7.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa administrasi yang dibayar	2 orang		27.600.000	27.600.000	100 %	2 orang	4 orang	100 %
7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	6 rekening		41.300.000	34.620.633	83,83 %	6 rekening	12 rekening	100 %
7.01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**	**2 kendaraan, 8 jenis dan 2 gedung**		**75.545.750**	**74.580.200**	**98,72**	**2 kendaraan, 8 jenis dan 2 gedung**	**4 kendaraan**	**100 %**
7.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	2 kendaraan		12.603.000	11.947.500	94,80 %	2 kendaraan	4 kendaraan	100 %
7.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang dipelihara	4 jenis		-	-	-	4 jenis	8 jenis	100 %

7.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 jenis		4.000.000	3.964.000	99,10 %	4 jenis	8 jenis	100 %
7.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	2 gedung		58.942.750	58.668.700	99,53 %	2 gedung	4 gedung	100 %
7.01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan	***100%***		28.756.000	28.649.100	99.63 %	***100%***	100 %	100 %
7.01	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.**	**3 kegiatan**				**0**	**3 kegiatan**	**6 kegiatan**	**100 %**
7.01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan.	3 kegiatan		28.756.000	28.649.100	99,63 %	3 kegiatan	6 kegiatan	100 %
7.01	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	**1 kegiatan**		-	-	-	**1 kegiatan**	2 kegiatan	100 %
7.01	02	2.03		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun	1 kegiatan		-	-	-	1 kegiatan	2 kegiatan	100 %
7.01	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah warga yang mendapat pelayanan**	**1.800 warga**		-	-	-	**1.800 warga**	**3.600.000**	**100 %**
7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	24 laporan		-	-	-	1.800 warga	24 laporan	100 %

7.01	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**24 laporan**		**107.775.000**	**85.431.930**	**79,27 %**	***100%***	**24 laporan**	**100 %**
7.01	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**24 laporan**		**107.775.000**	**85.431.930**	**79,27 %**	**24 desa dan 10 kegiatan**	**24 laporan**	**100 %**
7.01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes	20 program		1.500.000	1.250.000	83,33 %	24 desa	20 program	100 %
7.01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 kegiatan		106.275.000	84.181.930	79,21 %	10 kegiatan	16 kegiatan	100 %
7.01	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan**	**48 desa**		**12.615.000**	**6.350.000**	**50,34 %**	***100%***	**48 desa**	**100 %**
7.01	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**	**12 berkas**		**12.615.000**	**6.350.000**	**50,34 %**	**15 kegiatan3**	**15 kegiatan**	**100 %**
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 kegiatan		10.500..000	4.250.000	40,48 %	12 kegiatan	24 kegiatan	100 %
7.01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat	48 desa		2.115.000	2.100.000	99,29 %	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %
7.01	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**90 %**		-	-	-	***100%***	**100 %**	**100 %**
7.01	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**	**24 desa**		-	-	-	**75 orang**	**150 orang**	**100 %**

				Daerah									
7.01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan	24 desa		-	-	-	75 orang	150 orang	100 %
7.01	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentasekegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24 desa**		**10.025.000**	**9.750.000**	**97.26 %**	***100%***	**48 desa**	**100 %**
7.01	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24 desa**		**10.025.000**	**9.750.000**	**97,26**	**2 kegiatan**	**48 desa**	**100 %**
7.01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	24 desa		1.500.000	1.250.000	83,33 %	2 kegiatan	48 desa	100 %
7.01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24 desa		8.525.000	8.500.000	99,70 $	2 m2 kegiatan	48 desa	100 %

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73,17 %	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan dan Kurang memadainya bandwith internet mempengaruhi yang koneksi aplikasi virtual meeting (buffer) .	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Upaya mendapatkan bimbingan teknis dari tenga ahli, Menambah bandwith internet dengan meningkatkan alokasi anggaran pada Sub KegiatanPenyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36,14 %	Sangat rendah

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Komitmen Peklaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan, Sumber Daya Manusia yang menguasai I T	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti bimbingan tenaga ahli.
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,61 %	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang Sumber Daya Manusia yang menguasai I T	Terdapat risiko kurangt ercapainya target kinerja	Memanfaatkan sumberdaya yang adadengan mengikuti bimbingan tenaga ahli.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82,91 %	Tinggi
FaktorPenyebab	ImplikasiTerhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang Sumber Daya Manusia yang menguasai I T	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti bimbingan tenaga ahli.
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	73,73 %	Sedang
FaktorPenyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kurang Sumber Daya Manusia yang menguasai I T	Terdapat risiko kurangt tercapainya target kinerja	Memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan mengikuti bimbingan tenaga ahli.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,66 %	Sangat tnggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan	Target Renstra tercapai	Mendorong Sumber Daya yang ada untuk memotivasi yang lain agar meningkatkan kinerja.

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan IV

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rejoso terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rejoso

No.	Indikator	Kondisi kinerja sebelumnya	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	7
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	73,49	74	76

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rejoso

No.	Indikator	Kondisi kinerja sebelumnya	Target	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88,98	89	91
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	70 %	75 %	85 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam peningkatan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
b) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
c) Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif

		masyarakat dan desa serta trantib.	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rejoso, maka dalam pembuatan Renja perlu untuk memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Agar penyusunan rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana kerja yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah

"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA", pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Kecamatan Rejoso memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-3 serta sasaran strategis daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik .

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
b) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.
c) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

d) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

e) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

f) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sedangkan peluang yang didapatkan dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;

b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

c. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;

d. Serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.3.5. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Isu strategis pelayanan Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

a) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi

kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

b) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

e) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Rejoso guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

e) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Rejoso**	***Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso***	**75**	**3.107.774.913**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Rejoso**	***Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso***	**75**	**3.534.747.839**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9 Dok**	**37.470.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9 Dok**	**47.470.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6.000.000	

1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	31.470.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	41.470.000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28 Dokumen**	**2.604.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan**	**29 Dokumen**	**2.766.800.000**	
1.2.1	Penyediaan Gaji	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan	2.600.000.000	Penyediaan Gaji	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan	2.760.000.000	
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.800.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	3.000.000	

			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	28 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	12 Dokumen	1.000.000	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	12 Dokumen	**2.000.000**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000	
1.3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**20.908.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**31.308.000**	

1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	13.708.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	21.708.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rejoso	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	7.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Rejoso	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	9.600.000	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**131.672.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**239.672.500**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket	55.668.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	106.668.000	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	1 paket	17.127.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	134 paket	22.127.500	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-	Kec. Rejos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	2 Dokumen	9,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	720 Dokume	9,000,000	

	Undangan	o	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n		
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	13.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	13.500.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	15,814,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	55,814,000	
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	7.563.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	17.563.000	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**20 unit**	**96.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**91 unit**	**170.000.000**	
1.5.1	Pengadaan Mebeleur	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 unit	34.000.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Rejoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 unit	50.000.000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya.	Kec. Rejoso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	62.000.000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya.	Kec. Rejoso	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	120.000.000	

1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48 Laporan**	**95.724.413**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**48 Laporan**	**108.497.339**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.724.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.724.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	55.000.413	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	67.773.339	
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**120.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**169.000.000**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rejoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Rejoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	45.000.000	

1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Kec. Rejoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	7.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Rejoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	6.000.000	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	8.000.000	
1.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	70.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Rejoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	110.000.000	
2.1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Rejoso**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100 %**	**81.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Rejoso**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100 %**	**106.000.000**	
2.1.1	**Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**67.000.000**	**Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**82.000.000**	
2.2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Rejos	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	3 laporan	67.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi	3 laporan	82.000.000	

	Pelaksana-an Kegiatan Pemerintahan Dengan perang-kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	o	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Pelaksana-an Kegiatan Pemerintahan Dengan perang-kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
2.2	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**6.000.000**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**6.000.000**	
2.2.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	6.000.000	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	6.000.000	
2.3.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4 laporan**	**8.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4 laporan**	**18.000.000**	

2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	8.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	8.000.000	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**90%**	**171.227.300**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**90%**	**181.227.300**	
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**171.227.300**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**181.227.300**	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga kemasyarakatan	10,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga kemasyarakatan	10,000,000	
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	7 Dokumen	161.227.300	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	7 Dokumen	171.227.300	

	di Wilayah Kerja Kecamatan		Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			di Wilayah Kerja Kecamatan		Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**75 %**	**31.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100 %**	**36.000.000**	
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**12 laporan**	**31.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20 laporan**	**20.000.000**	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.000.000	
4.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	11.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Rejoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	16.000.000	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100 %**	**108.872.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100 %**	**150.872.200**	
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KD**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**120 Lembaga / organisasi kemasyarakatan**	**108.872.200**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KD**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**120 Lembaga / organisasi kemasyarakatan**	**150.872.200**	
5.1.1	Pembinaan wa-wasan kebang-saan dan keta-hanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan Pancasila,pelak-sanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerta-tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	800 orang	108.872.200	Pembinaan wa-wasan kebang-saan dan keta-hanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan Pancasila,pelak-sanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerta-tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Kec. Rejoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	800 orang	150.872.200	

			Indonesia					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**38.607.500**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Rejoso**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**86.607.500**	
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**24**	**38.607.500**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**Kec. Rejoso**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**24**	**38.607.500**	
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	14.295.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	192 Dokumen	22.295.000	
6.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff	24 Dokumen	24.312.500	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Rejoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff	24 Dokumen	44.312.500	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

f) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)", "Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan" dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	77
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	80 %

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu

strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN REJOSO KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN REJOSO						4.095.454.828,00							4.095.454.839,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.095.454.828,00							4.095.454.839,00	
	7.01	KECAMATAN						4.095.454.828,00							4.095.454.839,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso*	85 Nilai			75 Nilai	3.532.544.028,00						80 Nilai	3.534.747.839,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			9 Dokumen	48.509.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	47.470.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7.040.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		6.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Subbag PK		31/7/23
2.	Kabid Rendalev		31/7/23
3	Kabid PDM		31/7/23
4.			
5.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWA
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	41.469.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		41.470.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			29 Dokumen	2.766.858.782,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	2.766.800.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.759.958.782,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		2.760.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		1.800.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.020.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		3.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				28 Laporan	2.080.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		2.000.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			12 dokumen	1.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	2.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		2.000.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			26 dokumen	35.242.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	31.308.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	25.792.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		21.708.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	9.450.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		9.600.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			7 dokumen	202.674.696,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	239.672.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12.801.336,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		15.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	70.361.360,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		106.668.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				134 Paket	23.210.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	22.127.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		9.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	8.244.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		13.500.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	56.059.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		55.814.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	25.999.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		17.563.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disedlakan*	-			20 Unit	206.417.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	170.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				80 Unit	49.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		50.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	156.917.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		120.000.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			48 Laporan	111.022.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	108.497.339,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	43.272.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		40.724.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	67.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		67.773.339,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*	-			69 Unit	160.020.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	169.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	45.301.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		45.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	4.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		6.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	8.170.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		8.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	102.048.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		110.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**100 %**			**100 %**	**119.534.200,00**						**100 %**	**106.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	-			3 laporan	95.134.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi Informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	82.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	95.134.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi Informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		82.000.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*	-			2 dokumen	10.588.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi Informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	6.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	10.588.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		6.000.000,00	KECAMATAN REJOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			4 Laporan	13.811.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi Informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	18.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	13.811.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		18.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
3.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**90 %**			**90 %**	**176.988.600,00**						**90 %**	**181.227.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	-			120 Lembaga kemasyarakatan	176.988.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso	-	181.227.300,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				120 Lembaga Kemasyarakatan	13.838.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso		10.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				7 Dokumen	163.150.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso		171.227.300,00	KECAMATAN REJOSO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani***	**100 %**			**100 %**	**50.315.200,00**						**100 %**	**36.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			20 Laporan	50.315.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	36.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	27.526.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		20.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	22.788.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		16.000.000,00	KECAMATAN REJOSO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan***	**100 %**			**100 %**	**146.810.200,00**						**100 %**	**150.872.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	-			100 lembaga /organlsasl masyarakat	146.810.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso	-	150.872.200,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				800 Orang	146.810.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kecamatan Rejoso		150.872.200,00	KECAMATAN REJOSO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	**100 % 100 %**			**100 %**	**69.262.600,00**						**100 % 100 %**	**86.607.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	-			24 Desa	69.262.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso	-	86.607.500,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				192 Dokumen	26.712.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso		22.295.000,00	KECAMATAN REJOSO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				24 Dokumen	42.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Desa di wilayah Kecamatan Rejoso		64.312.500,00	KECAMATAN REJOSO
	JUMLAH							4.095.454.828,00							4.095.454.839,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan...

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi 2024 (Rp.)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	4.095.454.828

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Alokasi 2024 (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89	3.652.078.228
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	80 %	443.376.600

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso***	**75**	**3.532.544.028**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9 Dok**	**48.509.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	7.040.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	41.469.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan**	**29 Dokumen**	**2.766.858.782**
	Penyediaan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan	2.759.958.782
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.020.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 Laporan	2.080.000

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	12 Dokumen	**1.800.000**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26 Dokumen**	**35.242.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	25.792.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	9.450.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**202.674.696**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.801.336
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	70.361.360
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	134 paket	23.210.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	6.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	8.244.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	56.059.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	25.999.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**91 unit**	**206.417.300**
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 unit	49.500.000
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	156.917.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**	**48 Laporan**	**111.022.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.272.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	67.750.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**160.020.250**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	45.301.950
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 unit	4.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	8.170.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	102.048.300
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100 %**	**119.534.200**
	Koordinasi/ Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**95.134.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksana-an Kegiatan Pemerintahan Dengan perang-kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	3 laporan	95.134.000

		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**10.588.400**
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 dokumen	10.588.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**4 laporan**	**13.811.800**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	13.811.800
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**90%**	**176.988.600**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**120 Lembaga kemasyarakatan**	**176.988.600**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 lembaga kemasyarakatan	13.838.400
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7 Dokumen	163.150.200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100 %**	**50.315.200**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20 laporan**	**50.315.200**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	12	27.526.800

	Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 laporan	22.788.400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100 %**	**146.810.200**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KD	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**120 Lembaga / organisasi kemasyarakatan**	**146.810.200**
	Pembinaan wa-wasan kebang-saan dan keta-hanan Nasional dalam rangka memantabkan pengamalan Pancasila,pelak-sanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerta-tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800 orang	146.810.200
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**69.262.600**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**24**	**69.262.600**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	192 Dokumen	26.712.600
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff	24 Dokumen	42.550.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan Rejoso dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rejoso, 2023

CAMAT REJOSO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEC. REJOSO

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. I
NIP. 196804211994031010